



Rencana Kerja Perubahan

Tahun 2025

**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Madiun**

Jalan Dr. Soetomo, Nomor 83, Madiun, Kode Pos: 63132
Telepon (0351) 454301, Faks. (0351) 462792



PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soetomo, Nomor 83, Madiun, Kode Pos: 63132

Telepon (0351) 454301, Faks. (0351) 462792

Laman <http://www.capil.madiunkota.go.id> Pos el dukcapil@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.105/016/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
 21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;
 24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 26. Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
 27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025;
 28. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 29. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 30. Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025
- KEDUA** : Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian agar menjadikan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025
- KETIGA** : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 12 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Madiun,



AGUS TRIONO, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197303271993021002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta semua unsur mulai dai pimpinan, pejabat administrator, pejabat pengawas, sub koordinator dan unsur pelaksana yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan rencana kerja ini. Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalagh sebagai pedoan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Madiun, dan juga sebagai acuan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan dokumen yang sistematis mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang disusun berdasarkan RKPD Perubahan Kota Madiun Tahun 2025 dan tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang berlaku sebelumnya. Dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan dokumen rencana kerja perubahan ini di masa yang akan datang.

Demikain Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, untuk kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Madiun, 12 Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Kata Pengantar		i
Daftar isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	5
2.1	Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 (Sampai dengan bulan Mei)	5
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	13
3.1.	Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	13
3.2	Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025	13
3.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	28
BAB IV	PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I (bulan Maret 2025)
2. Tabel 2.2 Realiasi kinerja sasaran dan tujuan sampai dengan Triwulan I (bulan Maret 2025)
3. Tabel 3.1 Matrik Renja Perubahan Tahun 2025
4. Tabel 3.2. Perubahan Target kinerja dan Pagu Anggaran pada Renja 2025 dan Renja Perubahan 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan diperlukan dalam rangka menyesuaikan target dan indikator kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja.

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah disusun secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Kota Madiun yang telah ditetapkan sebelumnya diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025;
4. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2025-2026;
5. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2025.

Dengan demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, dengan dilakukan beberapa penyesuaian berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Secara normatif landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 tahun 2021;
24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025;
26. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025;
27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Madiun;
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 1.1 Evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (Sampai dengan Bulan Mei)

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

- 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I****2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 (Sampai dengan bulan Maret)**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Nomor 050-401.105/018/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2025-2026.

Setelah dilaksanakan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan bulan Maret 2025, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I (bulan Maret 2025)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7x100%		11=6+9		12=11/5x100%		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIL																			
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84.45		0	0	84.45		85.61 A		85.61 A		101,37%		85.61 A				Dukcapil
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	274.850.600	0	0	100	111.809.100	25	2.700.000	25	2.700.000	25	2,41	25	2.700.000	25	0,98	Dukcapil
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	55.521.000	0	0	12	27.760.500	3	2.700.000	3	2.700.000	25	9,73	3	2.700.000	25	4,86	Dukcapil
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	219.329.600	0	0	12	84.048.600	3	0	3	0	25	0	25	0	25	0	Dukcapil
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	%	100	10.432.830. 109	0	0	100	5.017.104.8 32	25	778.770.3 58	25	778.770.3 58	25	15,5	25	778.770.3 58	25	7,46	Dukcapil
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	28	10.275.050. 109	0	0	28	4.938.214.8 32	29	778.770.3 58	29	778.770.3 58	103,6	15,8	29	778.770.3 58	103,6	7,58	Dukcapil
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaa	Dokume n	12	157.780.000	0	0	12	78.890.000	3	0	3	0	25	0	3	0			Dukcapil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7x100%		11=6+9		12=11/5x100%		
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD																		
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	474.840.000	0	0	100	237.420.000	25	23.091.62 0	25	23.091.62 0	25	9,73	25	23.091.62 0	25	4,86	Dukcapil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	474.840.000	0	0	12	237.420.000	3	23.091.62 0	3	23.091.62 0	25	9,73	3	23.091.62 0	25	4,86	Dukcapil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.453.580.0 00	0	0	100	203.899.980	26,67	6.565.000	26.67	6.565.000	26.67	3.22	26.67	6.565.000	26,67	0.45	Dukcapil
2	12	1	2.07	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	20	1.453.580.0 00	0	0	15	203.899.980	4	6.565.000	4	6.565.000	26.67	3.22	26.67	6.565.000	20	0.45	Dukcapil
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.405.869.9 26	0	0	100	1.692.934.9 63	25	165.120.0 13	25	165.120.0 13	25	9,75	25	165.120.0 13	25	4,85	Dukcapil
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.405.869.9 26	0	0	12	1.692.934.9 63	25	165.120.0 13	25	165.120.0 13	25	9,75	25	165.120.0 13	25	4,85	Dukcapil
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100	1.430.519.7 40	0	0	100	698.515.203	25	43.618.00 0	25	43.618.00 0	25	6,24	25	43.618.00 0	25	3.05	Dukcapil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7x100%		11=6+9		12=11/5x100%		
						Urusan Pemerintah Daerah																		
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	21	191.460.000	0	0	21	95.730.000	3	11.645.50 0	3	11.645.50 0	14,29	12,2	3	11.645.50 0	14,29	6,08	Dukcapil
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	Unit	1	706.510.666	0	0	1	336.510.666	1	10.961.75 0	1	10.961.75 0	25	3,26	1	10.961.75 0	25	0,02	Dukcapil
2	12	1	2.09	1 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	Unit	75	532.549.074	0	0	75	266.274.537	13	21.010.75 0	13	21.010.75 0	17,33	7,89	13	21.010.75 0	7,89	3,95	Dukcapil
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependuduka n	%	98,3	343.097.700	0	0	98,3	151.548.850	94,93	18.700.00 0	94,93	18.700.00 0	96,57	12,3	94,93	18.700.00 0	96,57	5,45	Dukcapil
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependuduka n	%	100	343.097.700	0	0	100	151.548.850	100	18.700.00 0	100	18.700.00 0	100	12,3	100	18.700.00 0	100	5,45	Dukcapil
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	12	277.817.700	0	0	12	128.908.850	3	9.900.000	3	9.900.000	25	7,68	3	9.900.000	25	3,56	Dukcapil
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependuduka n	Dokume n	38.00 0	65.280.000	0	0	38.00 0	22.640.000	14.11 4	8.800.000	14.11 4	8.800.000	37,14	38,9	14.11 4	8.800.000	37,14	13,5	Dukcapil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	99,95	213.818.400	0	0	99,95	81.909.200	99,78	13.068.00 0	99,78	13.068.00 0	99,83	16	99,78	13.068.00 0	99,83	6,11	Dukcapil
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan	%	100	213.818.400	0	0	100	81.909.200	100	13.068.00 0	100	13.068.00 0	100	15,9 5	100	13.068.00 0	100	6,11	Dukcapil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2025 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7x100%		11=6+9		12=11/5x100%		
						Dokumen Pencatatan Sipil																		
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	7.000	126.568.800	0	0	7.000	53.284.400	1.668	0	1.668	0	23,83	0	1.668	0	23.83	0	Dukcapil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	layanan	4	87.249.600	0	0	4	28.624.800	4	13.068.000	4	13.068.000	25	45,7	4	13.068.000	25	15	Dukcapil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	stakeholder	35	316.033.860	0	0	35	146.033.860	17	9.600.000	17	9.600.000	50	6.57	17	9.600.000	50	3.04	Dukcapil
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang terupdate	%	100	316.033.860	0	0	100	146.033.860	100	9.600.000	100	9.600.000	25	6.57	100	9.600.000	25	3.04	Dukcapil
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	2	210.330.500	0	0	0	98.330.500	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6,1	0	6.000.000	0	0.03	Dukcapil

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh informasi:

1. Indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai 25% dari target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 target akan tercapai 100%.
2. Indikator kinerja program
 - a. Program pendaftaran penduduk dengan indikator kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan dengan target 98,30% telah terealisasi 94,93%.
 - b. Program pencatatan sipil dengan indikator kinerja persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan target 99,95% telah terealisasi 99,78%
 - c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan indikator kinerja Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan dengan target 35 stakeholder telah terealisasi 35 stakeholder
 - d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan indikator kinerja nilai saki perangkat daerah dengan target 85,61 Nilai, sementara belum ada evaluasi penilaian untuk tahun 2025
3. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2025 adalah Rp 410.432.853,00 dari total pagu anggaran Rp 8.427.607.999,80, atau 4,87%

Dalam pencapaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran ditemukan faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi diantaranya:

Faktor pendorong:

1. Kebutuhan kinerja dan pelaporan kinerja
2. Kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan

Faktor penghambat:

1. Tugas pokok dan fungsi pelaksana yang masih tumpang tindih
2. Sistem pengelolaan keuangan menggunakan sipd-ri merupakan hal baru dan masih harus dipelajari
3. Sistem pengadaan barang dan jasa dengan versi 6 merupakan hal baru dan masih harus dipelajari
4. Tidak adanya hasil analisa kebutuhan barang dan jasa

Rencana Tindak Pengendalian

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh atasan langsung masing-masing pelaksana
2. Membangun relasi yang bagus dengan bagian keuangan agar permasalahan sipd-ri dapat segera teratasi
3. Memerintahkan kepada seluruh ASN untuk ikut pelatihan pengadaan barang dan jasa agar pengadaan tidak tersentral kepada yang sudah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa saja

4. Memerintahkan kepada pengurus dan penyimpan barang untuk melaksanakan analisa kebutuhan barang dan jasa agar kebutuhan yang disajikan sudah berdasarkan hasil analisa

Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah. Dari pencapaian kinerja dan realiasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dapat disajikan realiasi kinerja sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi kinerja sasaran dan tujuan
Per 31 Maret 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
Tujuan						
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang tertib administrasi kependudukan	RPD	87,75%	94,62%	107,83%
			Renja	95%	94,62%	99,60%
Sasaran						
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan Publik	RPD	4,95 Indeks		Belum ada penilaian
			Renja	5,00 Indeks		Belum ada penilaian
2.	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	RPD	96,75%	97,88%	101,17%
			Renja	99,13%	97,88%	98,74%

Dari tabel 2.2 diperoleh informasi bahwa Realisasi indikator kinerja tujuan sampai dengan 31 Maret 2025 telah tercapai 99,60% dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Untuk indikator sasaran pertama Indeks Pelayanan Publik belum ada penilaian sampai dengan bulan Maret 2025. Sedangkan untuk indikator sasaran kedua Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah mencapai 98,74% dari target yang ditetapkan 99,13%.

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran tentu saja ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran diantaranya:

Faktor pendorong:

- Keberhasilan dalam penetapan kebijakan dan inovasi pelayanan
- Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan
- Peningkatan kualitas masyarakat untuk melaksanakan pembaruan data kependudukan ketika ada perubahan elemen data

Faktor penghambat:

- Keterbatasan SDM pelayanan baik secara kualitas maupun kuantitas
- Tata cara pelayanan online yang masih dianggap sulit oleh sebagian masyarakat pengguna layanan
- Kurangnya informasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan
- prosedur pengurusan dokumen administrasi kependudukan masih dianggap rumit oleh sebagian besar masyarakat

Rencana Tindak Pengendalian:

- Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan dengan mengikutsertakan dalam bimtek dan pelatihan
- Meningkatkan sosialisasi pelayanan baik online maupun offline dan memperluas jangkauan sosialisasi
- melaksanakan evaluasi secara rutin baik terhadap hasil sosialisasi maupun terhadap peningkatan kualitas petugas pelayanan
- optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan yang sudah ada
- optimalisasi inovasi pelayanan dengan merumuskan kebijakan pelayanan online yang lebih mudah

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

3.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan urusan Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan di dalam Dokumen Renstra 2025-2026 sebagai dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah dan dalam dokumen Renja 2025 sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Berdasarkan analisa, permasalahan yang dihadapi saat ini diantaranya:

1. Layanan online kurang diminati
2. Layanan jemput bola kurang maksimal
3. Integritas SDM pelayanan masih perlu ditingkatkan
4. Kurangnya sosialisasi prosedur dan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan
5. Pemanfaatan data DKB belum maksimal
6. Kurangnya sosialisasi terkait DKB dan kapan DKB diterbitkan
7. Waktu cut off dan release data DKB dari Kemendagri tidak dalam waktu yang bersamaan

Berdasarkan permasalahan diatas dapat ditarik menjadi isu strategis:

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini, maka tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2026 dan Renja 2025 masih sesuai, sehingga tidak dilakukan perubahan tujuan dan sasaran.

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Anggaran sebagai salah satu sumberdaya pendukung pencapaian sasaran dan tujuan tidak dipungkiri menjadi salah satu instrument yang sangat mempengaruhi keberhasilan. Pada tahun 2025 alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rp 8.746.175.988,00. Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah dilakukan efisiensi terhadap anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Rp 8.427.607.999,80.

Adapun rincian anggaran sebagaimana telah terinput di <http://sipd-ri.kemendagri.go.id/>
Secara rinci pagu anggaran untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Matrik Renja Perubahan Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL							8.341.175 .988,00	8.746.175 .988,00	8.418.607 .999,80	77.432.01 1,80							9.509.495 .639,00	
	2	URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA N DENGAN PELAYAN AN DASAR							8.341.175 .988,00	8.746.175 .988,00	8.418.607 .999,80	77.432.01 1,80							9.509.495 .639,00	
	2.12	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG ADMINIST RASI KEPENDU DUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL							8.341.175 .988,00	8.746.175 .988,00	8.418.607 .999,80	77.432.01 1,80							9.509.495 .639,00	
	2.12.01	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				84,40 Nilai	85,61 Nilai	7.961.684 .078,00	8.317.966 .328,00	7.981.299 .681,24	903.550.4 01,00							8.865.234 .479,00	
	2.12.01.2. 01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan , penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	111.809.1 00,00	103.985.7 00,00	35.829.10 0,00	- 75.980.00 0,00			Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencegah an dan Pembera ntasan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemerit ah yang Baik (2025) 3.	OPD, Pemerit ah Kota Madiu n, Masya rakat Kota Madiu n		162.548.4 00,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik				
	2.12.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Lapor an	12 Lapor an	27.760.50 0,00	27.560.50 0,00	21.110.50 0,00	- 6.650.000, 00	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencegah an dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik			48.060.50 0,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL
	2.12.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Lapor an	12 Lapor an	84.048.60 0,00	76.425.20 0,00	14.718.60 0,00	- 69.330.00 0,00	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencegah an dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata			114.487.9 00,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL

[illegible]

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD				12 Doku men	12 Doku men	78.890.00 0,00	2.010.000 ,00	2.010.000 ,00	- 76.880.00 0,00	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik			78.890.00 0,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL
	2.12.01.2. 06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	237.420.0 00,00	237.420.0 00,00	118.710.0 00,00	- 118.710.0 00,00			Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik	OPD, Pemer ntah Kota Madiu n, Masya rakat Kota Madiu n		378.613.0 00,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL
	2.12.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				12 Lapor an	12 Lapor an	237.420.0 00,00	237.420.0 00,00	118.710.0 00,00	- 118.710.0 00,00	Kota Madiu n, Semu a Keca matan,	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata			378.613.0 00,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			SKPD										Semu a Kel/De sa		Birokrasi , serta Memper kuat Pencegahan dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik				
	2.12.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase terlaksananya a pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	203.899.9 80,00	518.960.0 00,00	752.664.6 03,74	548.764.6 23,74			Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencegahan dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik	OPD, Pemer ntah Kota Madiu n, Masya rakat Kota Madiu n	715.682.6 40,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL	
	2.12.01.2. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	45 Unit	203.899.9 80,00	518.960.0 00,00	752.664.6 03,74	548.764.6 23,74	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencegahan dan Pembera ntasan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3.			715.682.6 40,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik				
	2.12.01.2. 08	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah				100 %	100 %	1.692.934 .963,00	3.578.958 .273,00	3.468.175 .346,45	3.468.175. 346,45			Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Penceg ahan dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik	OPD, Pemer ntah Kota Madiu n, Masya rakat Kota Madiu n	1.584.184 .114,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL	
	2.12.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan				12 Lapor an	12 Lapor an	1.692.934 .963,00	3.578.958 .273,00	3.468.175 .346,45	3.468.175. 346,45	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Penceg ahan dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata		1.584.184 .114,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	336.510.6 66,00	437.515.6 66,00	481.390.6 66,05	144.880.0 00,05	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencegah an dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer intah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer intah yang Baik		372.687.0 50,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL	
	2.12.01.2. 09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				75 Unit	75 Unit	266.274.5 37,00	265.469.5 37,00	210.889.0 61,00	- 55.385.47 6,00	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencegah an dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer intah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer intah yang Baik		317.534.4 43,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL	
1	2.12.02	PROGRAM PENDAFT ARAN PENDUDU K	Persentase kepemilikan dokumen kependuduk an				98,30 %	98,30 %	151.548.8 50,00	200.266.6 00,00	188.757.9 00,00	62.079.21 0,00							213.628.0 60,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2. 01	Pelayanan Pendaftar an Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 %	100 %	151.548.8 50,00	200.266.6 00,00	188.757.9 00,00	37.209.05 0,00			Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemerit ah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemerit ah yang Baik	Masya rakat Kota Madiu n, Pemerit ah Kota Madiu n, OPD		213.628.0 60,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL
	2.12.02.2. 01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Lapo ran	12 Lapo ran	128.908.8 50,00	177.826.6 00,00	169.817.9 00,00	40.909.05 0,00	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemerit ah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemerit ah yang Baik			160.654.0 60,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL
	2.12.02.2. 01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausah aan				3800 0 Doku men	50000 Doku men	22.640.00 0,00	22.440.00 0,00	18.940.00 0,00	- 3.700.000, 00	Kota Madiu n, Semu a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik,	(2025) 3. Pening katan			52.974.00 0,00	DINAS KEPENDUD UKAN

[illegible]

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				7000 Doku men	7000 Doku men	53.284.40 0,00	53.284.40 0,00	73.485.61 8,56	20.201.21 8,56	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik			103.784.4 00,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL
	2.12.03.2. 01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Laya nan	4 Laya nan	28.624.80 0,00	28.624.80 0,00	18.208.50 0,00	- 10.416.30 0,00	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik			77.981.20 0,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL
3	2.12.04	PROGRAM PENGELO LAAN INFORMAS I	Jumlah stakeholder yang memanfaatk an data				35 stake holder	35 stake holder	146.033.8 60,00	146.033.8 60,00	156.856.3 00,00	102.833.6 40,00							248.867.5 00,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODEN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	kependudukan																	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang terupdate				100 %	25 %	146.033.860,00	146.033.860,00	156.856.300,00	10.822.440,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	(2025) 3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (2025) 3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	OPD, Pemerintah Kota Madiun, Masyarakat Kota Madiun		248.867.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	98.330.500,00	98.330.500,00	76.535.500,00	- 21.795.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	(2025) 3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (2025) 3. Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			162.257.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAM BAH/ BERKUR ANG (10- 12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaata n Data Kependudu kan				34 Doku men	34 Doku men	47.703.36 0,00	47.703.36 0,00	80.320.80 0,00	32.617.44 0,00	Kota Madiu n, Semu a Keca matan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelu dupan	(2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik (2025) 3. Pening katan Transf ormasi Tata Kelola Pemer ntah yang Baik			86.610.00 0,00	DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIIL
	JUMLAH								8.341.175 .988,00	8.746.175 .988,00	8.418.607 .999,80	38.326.04 8.661,31							9.509.495 .639,00	

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara umum tidak ada penambahan atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan. Tetapi ada beberapa perubahan target kinerja serta pergeseran pagu anggaran antar sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2.

Perubahan Target kinerja dan Pagu Anggaran pada Renja 2025 dan Renja Perubahan 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Anggaran pada APBD 2025 dan Renja P 2025			
		Kinerja		Anggaran	
		APBD 2025	RENJA P 2025	APBD 2025	RENJA P 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 Nilai	85,61 Nilai	8.317.966.328,00	7.981.299.681,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 %	100 %	103.985.700,00	35.829.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	27.560.500,00	21.110.500,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Laporan	12 Laporan	76.425.200,00	14.718.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan</i>	100 %	100 %	3.090.272.252,00	2.828.256.004,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	28 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	3.088.262.252,00	2.826.246.004,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	2.010.000,00	2.010.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	237.420.000,00	118.710.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	237.420.000,00	118.710.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan</i>	100%	100%	518.960.000,00	752.664.603,74

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Anggaran pada APBD 2025 dan Renja P 2025			
		Kinerja		Anggaran	
		APBD 2025	RENJA P 2025	APBD 2025	RENJA P 2025
	<i>pemerintah daerah</i>				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	15 Unit	45 Unit	518.960.000,00	752.664.603,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	100 %	3.578.958.273,00	3.468.175.346,45
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	3.578.958.273,00	3.468.175.346,45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah</i>	100%	100%	788.370.103,00	777.664.627,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	21 Unit	21 Unit	85.384.900,00	85.384.900,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	437.515.666,00	481.390.666,05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	75 Unit	75 Unit	265.469.537,00	210.889.061,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Persentase kepemilikan dokumen kependudukan</i>	98,30 %	98,30 %	200.266.600,00	188.757.900,00
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	100 %	100 %	200.266.600,00	188.757.900,00
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	12 Laporan	12 Laporan	177.826.600,00	169.817.900,00
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</i>	38000 Dokumen	50000 Dokumen	22.440.000,00	18.940.000,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil</i>	99,95 %	99,95 %	81.909.200,00	91.694.118,56
Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil</i>	100 %	100 %	81.909.200,00	91.694.118,56
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan</i>	7000 Dokumen	7000 Dokumen	53.284.400,00	73.485.618,56

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Anggaran pada APBD 2025 dan Renja P 2025			
		Kinerja		Anggaran	
		APBD 2025	RENJA P 2025	APBD 2025	RENJA P 2025
Pelaporan Peristiwa Penting	<i>dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>				
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</i>	4 Layanan	4 Layanan	28.624.800,00	18.208.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan</i>	35 stakeholder	35 stakeholder	146.033.860,00	156.856.300,00
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<i>Persentase Data Kependudukan yang terupdate</i>	100 %	25%	146.033.860,00	156.856.300,00
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	98.330.500,00	76.535.500,00
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	34 Dokumen	34 Dokumen	47.703.360,00	80.320.800,00

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada Renja Perubahan Tahun 2025 masih sama dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2025. Perubahan hanya ada pada target kinerja beberapa sub kegiatan dan pagu anggaran sub kegiatan. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam Upaya pencapaian sasaran dan tujuan dalam melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu bidang urusan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan perubahan isu strategis dan permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil evaluasi pelayanan. Disamping itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2025 (31 Maret 2025).

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan 31 Maret 2025 yang ditetapkan dapat diketahui bahwa:

1. Sasaran strategis pertama: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan target 99,13%. Realisasi sementara adalah 97,88%. Adapun realisasi pada 31 Desember 2024 adalah 99,13%. Dengan demikian target yang ditetapkan adalah sama dengan realisasi tahun 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan realisasi tahun 2024 baru mencapai 98,74%.
2. Sasaran strategis kedua: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan target 5,00 Indeks. Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari Rata-rata Nilai aspek penilaian pelayanan publik diantaranya: 1. Kebijakan pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi Pelayanan Publik. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang prosesnya dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2025. Jadi sampai dengan disusunnya dokumen ini belum diperoleh hasil penilaian untuk tahun 2025.
3. Realisasi anggaran yang dialokasikan paa masing-masing sub kegiatan, kegiatan dan program secara umum telah diserap sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang telah ditetapkan. Hal ini bisa diketahui dari serapan anggaran sampai dengan 31 Maret 2025 yaitu sebesar Rp 410.432.853,00 dari total pagu Rp 8.427.607.999,80 atau 4,87%.

B. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Maret 2025 ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis yang menghambat penyelesaian isu strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, permasalahan:
 - a. Layanan online kurang diminati
 - b. Layanan jemput bola kurang maksimal
 - c. Integritas SDM pelayanan masih perlu ditingkatkan
 - d. Kurangnya sosialisasi prosedur dan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan
2. Optimalisasi pemanfaatan informasi administrasi kependudukan, permasalahan:
 - a. Pemanfaatan data DKB belum maksimal
 - b. Kurangnya sosialisasi terkait DKB dan kapan DKB diterbitkan
 - c. Waktu *cut off* dan *release* data DKB dari Kemendagri tidak dalam waktu yang bersamaan

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Strategi yang ditetapkan dalam Upaya peningkatan kinerja berdasarkan masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan
Strategi untuk menyelesaikan isu strategis ini adalah dengan:
 - a. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan dengan mengikutsertakan dalam bimtek dan pelatihan
 - b. Meningkatkan sosialisasi pelayanan baik online maupun offline dan memperluas jangkauan sosialisasi
 - c. melaksanakan evaluasi secara rutin baik terhadap hasil sosialisasi maupun terhadap peningkatan kualitas petugas pelayanan
 - d. optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan yang sudah ada
 - e. optimalisasi inovasi pelayanan dengan merumuskan kebijakan pelayanan online yang lebih mudah